



**PUTUSAN**

**Nomor 162/Pdt.G/2017/PA Blk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

Mulyani binti Sampo, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Baronang, Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Abdul Rahman Razak, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 34/SK/Pdt.G/2017/PA Blk. tanggal 16 Maret 2017, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Kadri bin Syukur, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, dahulu tempat kediaman di Jalan Baronang, Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh Wilayah Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Maret 2017 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor

Hal 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Blk



162/Pdt.G/2017/PA Blk, tanggal 16 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Kamis tanggal 19 April 2007 M bertepatan tanggal 1 Rabiul Ahir H pukul 11 : 30 Wita di Jalan Baronang, Kelurahan kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.191/022/VI/2007 dengan mahar emas 15 gram tertanggal 19 April 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Baronang, Kelurahan kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba selama  $\pm$  10 (sepuluh) tahun.
3. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
  1. Aditya Candra bin Kadir, laki-laki, lahir tahun 2007
  2. Adelya Citra binti Kadir, laki-laki, lahir tahun 2008
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terlibat pertengkaran hingga Penggugat dipukul oleh Tergugat satu kali dibagian kepala dan menyampaikan keinginan Tergugat pada Penggugat untuk bercerai karena menanyakan perihal perempuan yang sering menelfon Tergugat.
5. Bahwa sejak Bulan Januari 2015 Puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang menjadikan Tergugat meninggalkan kediaman dari rumah dan tidak diketahui kemana perginya sampai sekarang ini, sudah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya Penggugat ditinggalkan bersama kedua orang anaknya.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama  $\pm$  2 (dua) tahun tanpa jaminan lahir bathin dari Tergugat yakni sejak tanggal 15 Janurari 2015 sampai sekarang.

Hal/2 dari 17 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Blk



7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat maka Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi sehingga solusi yang terbaik adalah Penggugat dengan Tergugat bercerai.
8. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat, maka Penggugat memohon kiranya Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Pernikahan Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat Kadri bin Syukur terhadap Penggugat Mulyani binti Sampo.
3. Menetapkan pemeliharaan anak/hadhanah anak laki-laki bernama Aditya Candra bin Kadri umur 9 tahun dan anak perempuan bernama Adelya Citra binti Kadri umur 8 tahun, tetap kepada Penggugat, yaitu Mulyani binti Sampo sebagai ibu kandung anak tersebut;
4. Pengiriman Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakannya perkawinan dan tempat tinggal terakhir Penggugat.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

**Kehadiran pihak berperkara**

Hal 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Blk



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang walaupun Majelis Hakim memanggil Tergugat melalui media massa yakni Radio SPL FM sebanyak dua kali yaitu tanggal 23 Maret 2017 dan 25 April 2017 namun Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakli/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

#### **Tentang perdamaian**

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

#### **Tentang pemeriksaan dan pembuktian**

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti:

- a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 191/022/VI/2007, tanggal 19 April 2007, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P;
- b. **Saksi:**

Saksi pertama bernama **Nurfinah Hafzah binti Abd. Hakim**, umur 35 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di Jalan Baronang Nomor 16, Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Blk*



- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Baronang, Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis.
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sering bertengkar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama selama kurang lebih 2 (dua) tahun.
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama pisah tempat kediaman bersama Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi kedua bernama **Deni Ardiansyah bin Akmal**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada bertempat kediaman di Jalan Baronang Nomor 18, Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Buluk, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Baronang, Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba.

Hal 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Blk



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis.
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sering bertengkar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama selama kurang lebih 2 (dua) tahun.
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama pisah tempat kediaman bersama Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa, kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi selain mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Blk





Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

**Pertimbangan *legal standing* pihak berperkara**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai gugat, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan

Hal 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Blk



ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan perkawinan tersebut harus tercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat ( 1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam, sesuai kutipan akta nikah nomor 191/022/VI/2007 tanggal 19 April 2007, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

**Pertimbangan ketidakhadiran pihak berperkara**

Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

**Pertimbangan tentang perdamaian dan mediasi**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan

Hal 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Blk





nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

**Pertimbangan pokok perkara**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan dapat dianggap membenarkan dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-

Hal 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Blk



Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok masalah sebagai berikut:

- Apakah ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama dua tahun lebih?
- Apakah dengan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut mengakibatkan pada keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?

#### **Penilaian alat bukti Penggugat**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P tersebut yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat, sedangkan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi **Nurfinah Hafzah binti Abd. Hakim** dan saksi **Deni Ardiansyah bin Akmal**, masing-masing menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, namun sejak bulan Januari 2015 mulai tidak

Hal 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Blk



harmonis disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama dua tahun lebih dan tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi dan keterangannya pun secara materil patut dinyatakan telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, karena itu alasan-alasan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraianya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

#### **Pertimbangan fakta hukum dan kesimpulan**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 April 2007.
2. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Januari 2015.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 dan sudah tidak ada komunikasi lagi.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit atau tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat empat hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang *kedua* yaitu penyebab dari perselisihan tersebut karena Tergugat pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali, *ketiga* yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan/atau tidak berada dalam satu tempat kediaman bersama sejak bulan Januari 2015

Hal 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Blk



hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, *keempat*, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan '*azzawwaj al-maksuroh*' atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan

Hal 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Blk



semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*.

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama kurang lebih dua tahun hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak,

Hal 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Blk



tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudaratan maka adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diceraikan daripada tetap disatukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena Penggugat sebagai ibunya dan tuntutan Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Aditya Candra bin Kadir, umur 10 tahun dan Adelya Citra binti Kadir, umur 9 tahun dibawah pemeliharaan (hadanah) Penggugat.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat

Hal 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Blk





tersebut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005), karena itu demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat sebagai akibat dari putusan ini, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman dan perkawinan Penggugat dan Tergugat hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Kadri bin Syukur) terhadap Penggugat (Mulyani binti Sampo).

Hal 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Blk



4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Aditya Candra bin Kadir, umur 10 tahun dan Adelya Citra binti Kadir, umur 9 tahun dibawah pemeliharaan (hadanah) Penggugat
5. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba yang mewilayahi tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan tempat kediaman Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017 M., bertepatan dengan tanggal 2 Dzulka'dah 1438 H., oleh: Muhamad Anwar Umar, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Achmad Ubaidillah, S.H.I., dan Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Hj. Hajrah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Ubaidillah, S.H.I.

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hajrah

Hal 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Blk



Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 240.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Materai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).</b>